

PENGELOLAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISKEUDES PADA DESA CIMANDE HILIR KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Novia Eka Putri¹, Indra Cahya Kusuma²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor

Email: epnovia306@gmail.com, indra.cahya.k@unida.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Aplikasi Siskeudes ini diadopsi untuk mempermudah pengelolaan dan pelaporan keuangan desa yang sebelumnya menggunakan cara manual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan aplikasi Siskeudes mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun, beberapa hambatan masih dihadapi, seperti terbatasnya pemahaman sumber daya manusia yaitu perangkat desa dan fasilitas infrastruktur teknologi yang belum memadai, khususnya akses internet. Dalam mengatasi kendala ini, pemerintah desa secara rutin mengadakan pelatihan dan meningkatkan infrastruktur teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes, yang diharapkan berdampak positif pada peningkatan akuntabilitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Pengelolaan keuangan Desa, Siskeudes, Aplikasi, Transparansi, Desa Cimande Hilir.

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan internal dan kegiatan pembangunan di wilayahnya. Maka dari itu, Pemerintah Daerah harus memanfaatkan semua potensi sumber daya untuk mendukung pembangunan. Tujuan utama dari upaya ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat serta mempermudah koordinasi dan pengawasan penggunaan dana yang sumbernya berasal dari APBD, (Adawiyah, Kusuma, 2015).

Setelah disahkannya undang-undang tentang Desa, Pemerintah Pusat maupun Daerah semakin terfokus pada desa sebagai fondasi penguatan pembangunan nasional, karena kekuatan negara bergantung pada kesejahteraan desa. Dalam UU No.6 tahun 2014, desa didefinisikan sebagai komunitas hukum yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa beroperasi berdasarkan inisiatif, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam kerangka Pemerintah Indonesia. Untuk mendukung pengelolaan dan pembangun desa, Pemerintah mengalokasikan dana desa setiap tahun. Dana desa ini adalah mandat dari UU No.6 tahun 2014 yang akan terus dialokasikan selama UU ini berlaku.

Dalam rangka pengelolaan anggaran, pemerintah telah menciptakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk memfasilitasi penyusunan serta pelaporan APBDesa. Aplikasi ini menggantikan sistem manual yang sebelumnya digunakan, sehingga memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk lebih mudah memantau laporan dan realisasi anggaran pembangunan desa. Siskeudes adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan desa yang semula dikenal dengan nama Sistem Informasi Daerah Desa (SIMDA Desa). Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP sebagai tanggapan atas penerapan UU No.6 tahun 2014. Tujuan utama dari pengembangan Siskeudes adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

Beberapa kesimpulan penelitian mendukung mengenai implementasi Siskeudes. Menurut Rivan dan Maksam (2019) penerapan siskeudes ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan desa, sehingga diharapkan desa dapat mengelola keuangannya dengan baik, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa. Maryam, sellang, dan Erfina (2021) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Maiwa, menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

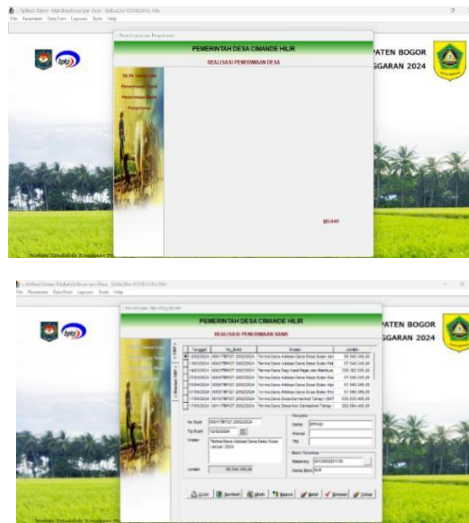
Saat ini, Siskeudes telah diterapkan diseluruh Desa di Indonesia dengan adanya surat edaran BPKP tentang penerapan Siskeudes. Terutama di wilayah Kabupaten Bogor, sejak tahun 2018 sudah mulai menerapkan Siskeudes. Kemudian pada tahun 2019 seluruh bendahara Desa menjalani pelatihan dan sosialisasi terkait penggunaan Siskeudes.

Namun, implementasi aplikasi Siskeudes di berbagai Desa masih mengalami beberapa tantangan. Pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan aparat Desa. Masih banyak aparat Desa yang belum sepenuhnya memahami cara penggunaan aplikasi Siskeudes. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan dan sosialisasi yang diberikan, sehingga penggunaan aplikasi belum maksimal dan seringkali menghambat proses administrasi keuangan Desa. Kedua, Keterbatasan infrastruktur. Tidak semua Desa memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan internet yang stabil. Keterbatasan ini mengakibatkan lambannya akses dan input data ke dalam sistem, sehingga pelaporan keuangan menjadi terlambat. Ketiga, pengawasan dan monitoring.

Meskipun Siskeudes dirancang untuk meningkatkan transparansi, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan dan monitoring oleh pemerintah kabupaten/kota. Kurangnya pengawasan ini dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Keempat, kendala kultural dan organisasi. Terdapat resistensi dari aparat Desa yang lebih nyaman dengan sistem manual yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Perubahan menuju sistem berbasis teknologi seringkali membutuhkan waktu dan adaptasi yang cukup lama.

Desa Cimande Hilir merupakan suatu desa di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, salah satu desa yang sudah menerapkan aplikasi Siskeudes. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika pemerintah Desa Cimande Hilir masih mengalami beberapa kendala dalam mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

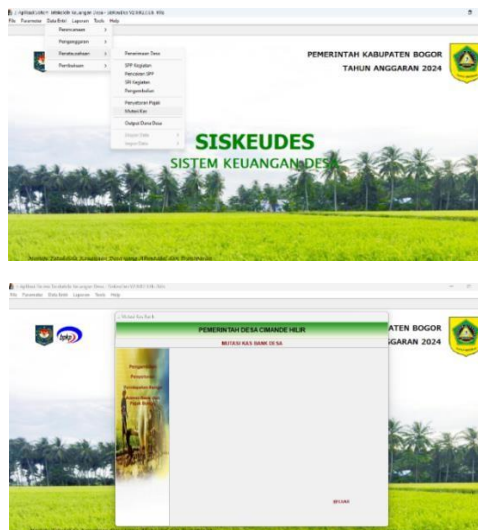
3) Masuk Menu Realisasi Penerimaan Desa



Gambar 3 Tampilan Input Penerimaan Dana Desa

Sumber: Kantor Desa Cimande Hilir, 2024

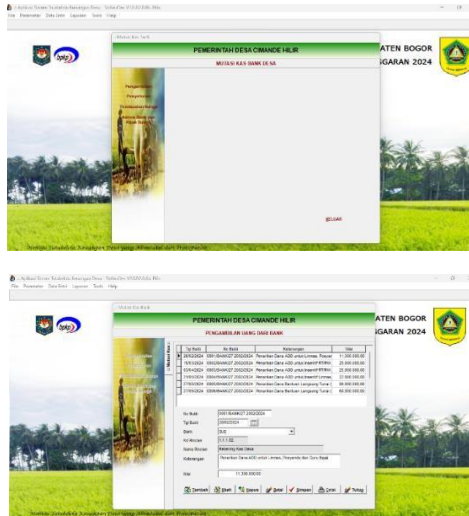
4) Mutasi Kas



Gambar 4 Tampilan Mutasi Kas

Sumber: Kantor Desa Cimande Hilir, 2024

5) Pengambilan Uang



Gambar 5 Proses Penginputan Pengambilan Uang dari Bank



Gambar 6 Dokumen Bukti Pengambilan Uang dari Bank

Sumber: Kantor Desa Cimande Hilir, 2024

6) Output Laporan Keuangan pada Siskeudes

a. Buku Kas Umum

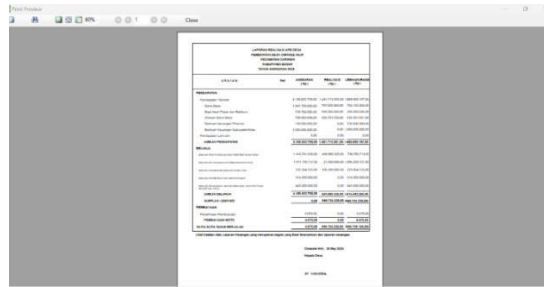
Gambar 7 Buku Kas Umum

Sumber: Desa Cimande Hilir, 2024

b. Buku Pembantu Kas Tunai

- c. Buku Pembantu Kas Tunai digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang disetorkan ke Kas Umum Negara.

7) Laporan Realisasi Anggaran Desa



Gambar 8 Laporan Realisasi Anggaran

Sumber: Desa Cimande Hilir, 2024

2. Permasalahan yang dihadapi Instansi

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan, penulis menemukan adanya kendala yang dihadapi oleh kantor desa Cimande Hilir dalam pengelolaan sistem keuangan menggunakan aplikasi siskeudes. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam memahami prosedur pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes.

Pegawai masih kebingungan karena data yang di input harus rinci. Jika tidak, maka tidak akan terdeteksi dalam sistem.

- 2) Jaringan internet yang kurang memadai sehingga menghambat kegiatan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes.

Faktor jaringan internet yang kurang memadai juga masih banyak terjadi, terutama di desa-desa terpencil. Hal ini menyebabkan kegiatan pengelolaan keuangan desa menjadi terhambat dan tidak maksimal.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Instansi dalam Mengatasi Masalah

Dalam suatu instansi pasti akan banyak menemukan kendala atau hambatan yang terjadi. Hal ini mendorong pemerintah instansi untuk selalu beradaptasi dan berupaya untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam keberlangsungan instansi tersebut. Adapun upaya-upaya pemerintah desa Cimande Hilir dalam mengatasi

masalah yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes, diantaranya sebagai berikut.

1) Adaptasi Pegawai

Pegawai pemerintah Desa Cimande Hilir terus berupaya untuk beradaptasi seiring berubahnya proses pengelolaan keuangan desa. Seiring dengan hadirnya aplikasi siskeudes, pegawai desa berusaha mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis sebanyak dua atau tiga kali dalam setahun. Adanya aplikasi siskeudes, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih mudah dibandingkan dengan cara manual.

2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Mengingat seringnya terjadi kendala jaringan saat melakukan kegiatan pengelolaan sistem keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes, pemerintah Desa Cimande Hilir selalu berusaha meningkatkan fasilitas jaringan internet di Kantor Desa Cimande Hilir untuk meminimalisir terjadinya kendala jaringan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Hal ini bertujuan agar kegiatan pengelolaan sistem keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes dapat dilaksanakan secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Aplikasi siskeudes telah diterapkan sejak tahun 2018. Kehadiran aplikasi ini memudahkan pengelolaan keuangan desa. Penerapan siskeudes juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Dalam pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes, instansi masih mengalami hambatan-hambatan seperti kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam memahami prosedur pengelolaan sistem keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes dan jaringan internet yang kurang memadai

sehingga menghambat kegiatan pengelolaan sistem keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes.

3. Instansi mengatasi kendala yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, instansi juga berupaya meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas jaringan internet. Dengan langkah ini, instansi dapat mengurangi gangguan jaringan saat menggunakan aplikasi Siskeudes.

Saran

1. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan

Diperlukan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk perangkat desa agar lebih mahir dalam menggunakan aplikasi siskeudes.

2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi, seperti menyediakan koneksi internet yang stabil dan perangkat desa yang memadai, guna mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes.

3. Monitoring

Pemerintah melakukan pemantauan serta evaluasi berkala terhadap penerapan siskeudes untuk memastikan bahwa aplikasi ini berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal dalam pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

Adawiyah, W., & Kusuma, I. C. (2015). **Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi**. *Jurnal Akunida*, 1 (1), 17-26.

Indonesia, P. R. (2014). **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**. Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Maryam, M., Sellang, K., & Erfina, E. (2021). **Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Maiwa.** JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi, 9 (3), 171-180.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). **Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa.** Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 92-100.